

ABSTRAKSI

Indonesia dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla 2004-2008, mengalami banyak tekanan dalam hal ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam usaha memperbaiki perekonomian dan menjawab janji pada masa kampanye, SBY-JK membentuk sebuah kabinet yang berisi orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya agar dapat menjawab dinamika dan problematika yang di hadapai bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya terdapat beberapa menteri yang diindikasi mempunyai latar belakang pro Barat, dalam hal ini mereka menempati posisi yang penting. Beberapa menteri tersebut ada juga yang merangkap sebagai pengusaha. Banyak pengamat menyatakan bahwa menteri yang merangkap pengusaha rentan terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan jabatannya. Beberapa menteri yang berpola pikir dan berlatar belakang pro barat antara lain Boediono dan Sri Mulyani. Dari track record mereka dalam pemerintahan sebelumnya keduanya dapat dikatakan adalah agent dari World Bank dan IMF. Pada posisi pengusaha ada Aburizal Bakrie, representasi KADIN ini adalah pengusaha lokal yang mempunyai usaha di berbagai bidang di Indonesia salah satunya adalah Lapindo Brantas.

Dalam perkembangan kedepannya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan meningkatkan rasio utang Indonesia pada Asian Development Bank, padahal penyerapan APBN sangat rendah. Padahal utang tersebut menjadi salah satu pembiayaan APBN. Boediono menjual BUMN yang berprospek bagus dengan alasan pasra bebas dan pencabutan subsidi kepada rakyat miskin dalam hal BBM juga dilakukan atas desakannya. Aburizal Bakrie mengalami konflik kepentingan pada permasalahan lumpur Lapindo, yang jelas disebutkan oleh para ahli pertambangan bahwa terjadinya bencana tersebut murni kesalahan PT. Minarak Lapindo namun kedepannya dapat menjadi bencana nasional yang dalam reklamasi dan ganti ruginya pemerintah ikut menanggungnya.

Di beberapa pulau rakyat selalu menjadi korban dari kepentingan pengusaha (MNC's) yang berkeinginan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan Indonesia seperti Thames (Inggris). Danone dan Lyonnais (Prancis) yang telah mengeksploitasi sumber-sumber mata air di Indonesia. Perusahaan agribisnis raksasa seperti Du Pont, Charoen Phokphand, Sygenta, Novartis, Monsanto, Sakata, Bayer, Delta and Pine Land dan anak-anak perusahaan mereka di tingkat nasional telah menguasai telah menguasai pasar nasional dalam hal pembibitan. Dalam usaha perkebunan kelapa sawit terdapat sembilan perusahaan yang dapat dikatakan sebagai pemain utama yaitu PT Salim Plantation, PT Golden Agri Resources, Texmaco Group, PT Asian Agri, Pt Astra Agro Lestari Tbk, Hasim Group, Surya Dumai Group, Pt PP London Sumatra Indonesia Tbk, Duta Palma Group dan PT Bakrie Sumatra Plantation. Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengurus perkebunan-perkebunan rakyat dengan adanya HGU selama 95 tahun maka perusahaan tersebut semakin menjadi-jadi dalam mengembangkan usahanya tanpa beroreintasi terhadap kepentingan rakyat kecil. Dalam bidang pertambangan ada 10 perusahaan pertambangan besar di Indonesia yaitu; PT.Freeport/Rio Tinto di Papua, PT. Indo Muro Kencana/Aurora, PT. Ampalit/Pelsart di Kalteng, PT. Kelim Eguatorial Mining/Rio Tinto dan PT. Indomico Mandiri di Kaltim, PT.Inco di Sulsel dan Sulteng, PT.Newmont di Sulut dan NTB Serta PT. NHM di Maluku.

Perusahaan-perusahaan diatas dalam kenyataannya membuat rakyat miskin Indonesia meningkat, namun pemerintah selalu memfasilitasi dan mempermudah perusahaan-perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya